

# PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

Hanggalih Kintaatmaja

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ney.neychan.ney@gmail.com

## ABSTRACT

*The issue of transparency and accountability in public finance management is currently a hot thing discussed. The demands of good governance as a new paradigm in assessing the performance of the government requires financial reporting form that can be accounted for. As a form of accountability, financial statements must comply with generally accepted accounting principles and fairly presented. This study examines the effect of the effectiveness of internal control, understanding of financial accounting systems, and human resource capacity of the quality of financial information on the financial statements of DPPKAD Sukoharjo. This research was conducted at the Department of Finance and Asset Management Area/Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo. Data collected by the census method by distributing questionnaires to all employees of the financial section DPPKAD Sukoharjo some 75 people. The variables examined in this study include the effectiveness of internal control, understanding of financial accounting systems, human resource capacity and the quality of financial reporting information. The results of research conducted analysis showed that partially, the effectiveness of internal control, understanding of financial accounting systems, and human resource capacity of each positive effect on the quality of financial information on the financial statements DPPKAD Sukoharjo. Additionally jointly effectiveness of internal control, understanding of financial accounting systems, human resource capacity to influence the quality of financial information on the financial statements DPPKAD Sukoharjo.*

**Keywords:** *internal control, financial accounting systems, capacity of human resource, financial information, financial statements*

## PENDAHULUAN

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara saat ini menjadi hal yang hangat diperbincangkan. Adanya tuntutan good governance sebagai suatu paradigma baru dalam menilai kinerja pemerintah menuntut bentuk pelaporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting* (Marda, 2014: 2) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Indriasari (2008: 2), pemerintah daerah memang berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambil keputusan.

Pemerintah Indonesia telah merespon tuntutan akuntabilitas tersebut dengan memulai babak baru akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan ditetapkannya Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan payung hukum tersebut, mulai tahun 2005 pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara khususnya atas hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/D berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah juga pada dasarnya telah membagi otoritas pengelola keuangan dengan menetapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai organisasi pemerintah yang berfungsi melakukan fungsi penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah. Adanya DPPKAD sebagai SKPD yang memiliki fungsi di bidang keuangan daerah diharapkan mampu menjaga kualitas laporan keuangan daerah dan dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang telah diterima secara umum.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang didukung dengan dikeluarkannya PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diganti dengan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban kepala daerah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah terkait perbaikan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Walau demikian, fakta yang seringkali ditemui adalah kualitas laporan keuangan daerah masih seringkali dipertanyakan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun sementara LKPD dengan status *disclaimer* dan tidak wajar justru semakin naik. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan semester I tahun 2014 oleh BPK menunjukkan adanya 5.948 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp 10,92 triliun. Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp 540,56 miliar. Pada pemeriksaan semester I Tahun 2014 ini, BPK menemukan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, lembaga perwakilan dan seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut antara lain, mengenai persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Berdasarkan pemeriksaan atas 184 LKPD, BPK menemukan ketidaksiapan pemerintah Daerah menerapkannya. Hasil pemeriksaan tersebut hampir sama dengan apa yang menjadi temuan BPK pada semester II tahun 2013 dimana kualitas LKPD masih banyak memiliki kelemahan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai potensi kecurangan yaitu sebanyak 3.505 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan sebanyak 1.782 kasus merupakan kelemahan administrasi, serta sebanyak 2.257 kasus senilai Rp 4,72 triliun merupakan ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2013 dan 2014 pada dasarnya menyimpulkan bahwa salah satu hal terbesar dalam penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan keuangan instansi pemerintah daerah adalah buruknya sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Menurut Mulyadi (2002: 189), sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Di dalam sistem pengendalian intern atau kontrol intern terdapat suatu proses, yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. Menurut *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) terdapat lima komponen dari struktur pengendalian intern yang dapat dijadikan indikator antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan.

Kualitas informasi laporan keuangan pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh pengendalian intern, tapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam proses akuntansi. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi/kelembagaan, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Alimbudiono dan Fidelis (2004) dalam Santiadji dan Sutrisno (2011), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat dari *level of Responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut.

Permasalahan kualitas informasi laporan keuangan pada dasarnya juga sangat berhubungan dengan pemahaman dan penerapan basis akuntansi yang sebenarnya bukan sekedar masalah teknis akuntansi namun juga kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi dan pilihan akuntansi dalam mendesain serta menganalisis suatu transaksi keuangan pada instansi Pemerintahan Daerah. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan merupakan suatu pemahaman terhadap sistem yang mengakomodir pengorganisasian formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi Menurut Warren, Reeve, Fees (2005: 234), merupakan serangkaian metode disertai sejumlah prosedur ataupun cara yang terstruktur untuk mengumpulkan informasi, menyusun, mengklarifikasikan, Mengikhtisarkan, dan melaporkan segala informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan pada dasarnya terdiri dari pemahaman terhadap unsur akuntansi dan tujuan sistem akutansinya.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain Ni Made Rika Krisna Dewi dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di 10 SKPD di kabupaten Jembrana Propinsi Bali. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Made Ayu Darmani dkk (2014) juga melakukan penelitian dengan mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengendalian intern terhadap nilai laporan keuangan pada SETDA Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Buleleng. Selain itu Kadek Hengki Primayana dkk (2014) juga melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, pertama apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo? Kedua, apakah pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo? Ketiga apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo? Keempat, apakah pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo?

Dari pertanyaan yang diajukan, bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh antara pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, (2) mengetahui pengaruh antara pemahaman sistem akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, (3) untuk mengetahui pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. (4) untuk mengetahui pengaruh antara pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

Hipotesis dari penelitian ini adalah (1) Terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, (2) Terdapat pengaruh antara pemahaman sistem akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, (3) Terdapat pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. (4) Terdapat pengaruh antara pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer dan sekunder, yang merupakan data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden yang berasal dari kuesioner yang disebar. Data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, penjelasan atau gambaran umum organisasi serta data jumlah pegawai bagian keuangan pada Dinas. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian keuangan pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Populasi yang berkaitan dengan penelitian berjumlah 75. Di dalam penelitian ini berupa penelitian sensus dengan mengambil keseluruhan total populasi yang ada yang dalam hal ini adalah pegawai pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 75 orang sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data merupakan syarat penting yang berlaku dalam kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang bertujuan untuk menguji apakah data bersifat valid, yang berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan, sehingga dapat diterima dalam kinerja tertentu, dan reliabel (andal) jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 16.0 for Windows. Untuk pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Grobanch Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Grobanch Alpha* > 0,70 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007: 46).

Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini, uji normalitas sebaran data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* yang terdapat dalam program komputer SPSS 16.0 for Windows. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai signifikansi dari uji normalitas ini harus lebih besar dari pada 0,05. Apabila model uji telah memenuhi syarat normalitas, maka selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) menurut Ghazali (2012). Multikolinearitas dilihat dari masing-masing nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $\leq 10$  dan nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  yang terdapat dalam program komputer SPSS 16.0 for Windows. Selanjutnya Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode *Scatterplot* yang terdapat dalam program komputer SPSS 16.0 for Windows. Konsekuensi dari heteroskedastisitas yaitu, jika terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan berdasarkan masukan variabel X terhadap variabel Y. Langkah selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Uji regresi parsial (*t-test*), uji regresi simultan (*F-test*), serta koefisien determinasi ( $R^2$ ), yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen, yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap satu variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Waktu yang dibutuhkan dalam penyebaran kuesioner sampai terkumpul kembali adalah kurang lebih 2 minggu, yang dilaksanakan dari tanggal 22 Januari sampai 7 Februari 2015. Dari 75 kuesioner yang disebarkan, keseluruhan kuesioner dapat diterima kembali dengan kondisi baik dan dapat dianalisis. Komposisi responden dari segi jenis kelamin pada penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki. Pada umumnya responden yang bekerja pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo pada penelitian ini berpendidikan paling banyak pada tingkat Diploma III (D3) dan Sarjana (S1/S2). Lama bekerja responden pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo didominasi dengan rentang waktu 5-10 tahun.

Analisis data diawali dengan menguji kualitas data yang menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas untuk masing-masing pertanyaan dari variabel pengendalian intern ( $X_1$ ) memiliki nilai *p-value*  $< 0,05$ , variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) memiliki nilai *p-value*  $< 0,05$ , variabel kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) memiliki nilai *p-value*  $< 0,05$  dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki nilai *p-value*  $< 0,05$ , dengan demikian masing-masing item pertanyaan dari variabel-variabel tersebut dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwanilai *Cronbach's Alpha* masing-masing pertanyaan dari variabel pengendalian intern ( $X_1$ ), variabel Pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ), variabel kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) berada di kisaran angka 0,713-0,824 yang di atas dari nilai koefisien *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . maka seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel. Langkah selanjutnya adalah pengujian data dengan uji asumsi klasik yaitu dengan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen pengendalian intern ( $X_1$ ) memiliki nilai *tolerance value* 0,846 dan

VIF 1,182, variabel Pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) memiliki nilai *tolerance value* 0,708 dan VIF 1,412, dan variabel kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) memiliki nilai *tolerance value* 0,662 dan VIF 1,510. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi menggunakan Run Test dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,417 lebih besar dari 0,05, ini berarti antara residual tidak terdapat hubungan korelasi.

Hasil *output* perhitungan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows menunjukkan *p-value* untuk variabel pengendalian intern ( $X_1$ ) sebesar 0,614, pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) sebesar 0,965 dan kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) sebesar 0,896, semua *p-value* > 0,05 ini berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov test* (K – S) dengan bantuan komputer program SPSS ver 16,00 diperoleh nilai sebesar 0,277 > 0,05. Hal ini menunjukkan keadaan yang tidak signifikan, berarti  $H_0$  diterima artinya bahwa data residual berdistribusi normal. Setelah data diuji dengan uji kualitas data dan uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis.

Tabel 1  
Hasil Uji Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Signifikansi
Konstanta	3,010	1,030	0,307
Efektivitas Pengendalian Intern	0,235	0,233	0,006
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	0,533	0,439	0,000
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,389	0,336	0,000
F = 39,575			0,000
Adjust R <sup>2</sup> = 0,610			

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = 3,013 + 0,235X_1 + 0,533X_2 + 0,389X_3$$

Tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, di mana kenaikan atau penurunan variabel independen (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y). Artinya, setiap dilakukan peningkatan pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia pada pegawai bagian keuangan DPPKAD, maka akan berpengaruh secara positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : 3,013 artinya jika pengendalian intern ( $X_1$ ), pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) dan kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) sama dengan nol, maka kualitas informasi laporan keuangan (Y) adalah positif.
- b1: 0,235 artinya pengaruh variabel pengendalian intern ( $X_1$ ) terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y) positif, artinya apabila pengendalian intern meningkat, maka dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan (Y), dengan asumsi variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) dan kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) dianggap tetap.

b2: 0,533 artinya pengaruh variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan (X<sub>2</sub>) terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y) positif, artinya apabila pemahaman sistem akuntansi keuangan meningkat, maka dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan (Y), dengan asumsi variabel pengendalian intern (X<sub>1</sub>) dan kapasitas sumber daya manusia (X<sub>3</sub>) dianggap tetap.

b3: 0,389 artinya pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia (X<sub>3</sub>) terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y) positif, artinya apabila kapasitas sumber daya manusia ditingkatkan, maka dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan (Y), dengan asumsi variabel pengendalian intern (X<sub>1</sub>) dan pemahaman sistem akuntansi keuangan (X<sub>2</sub>) dianggap tetap.

Dari analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y) adalah variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan (X<sub>2</sub>), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 0,566.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern terbukti dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan hasil Uji t terhadap pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X<sub>1</sub>) dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,006 dan nilai t hitung sebesar 2,820. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini “pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo”, diterima kebenarannya. Hasil pengolahan data disimpulkan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Pengaruh antara pengendalian intern DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dengan kualitas informasi laporan keuangan adalah dengan semakin baik pengendalian intern maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo akan semakin baik pula. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian Made Ayu Darmani dkk (2014) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pada pengujian tersebut hasil analisis pada variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan (X<sub>2</sub>) diperoleh *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan (X<sub>2</sub>) terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa: “pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo”, diterima kebenarannya. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo telah memahami proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai. Hasil penelitian ini, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Rika Krisna Dewi dkk (2014) yaitu pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pada pengujian tersebut juga diperoleh *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  untuk variabel kapasitas sumber daya manusia (X<sub>3</sub>) maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan kapasitas sumber daya manusia (X<sub>3</sub>) terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa: “kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo”, diterima kebenarannya. Hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan hubungannya positif. Pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan adalah semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo akan semakin baik. Dengan demikian penelitian ini juga sejalan

dengan penelitian Made Ayu Darmani dkk (2014) dan Kadek Hengki Primayana dkk (2014), menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pengendalian intern ( $X_1$ ), pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) dan kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan ( $Y$ ). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa: “Pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada bagian keuangan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo”, diterima kebenarannya.

Uji selanjutnya adalah uji determinasi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau pengaruh yang diberikan variabel bebas yaitu pengendalian intern ( $X_1$ ), pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) dan kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan ( $Y$ ). Hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,610 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pengendalian intern ( $X_1$ ), pemahaman sistem akuntansi keuangan ( $X_2$ ) dan kapasitas sumber daya manusia ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan ( $Y$ ) sebesar 61 persen sedangkan sisanya ( $100\% - 61\%$ ) = 39 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, pengaruh pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan, dapat ditarik kesimpulan bahwasalahasil pengujian signifikansi pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian signifikansi pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian signifikansi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil analisis juga menunjukkan kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pengendalian intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan sebesar 61 persen sedangkan sisanya ( $100\% - 61\%$ ) = 39 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, 2008, *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*, Airlangga, Jakarta
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Arfan Ikhsan, 2008, *Pengantar Praktis Akuntansi, Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Desi Indriasari dan Bambang Nahartyo, 2008, *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal SNA I. Pontianak



- Governmental Accounting Standard Board (GASB), 1999, *Concepts Statement No.1: Objective of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management's Discussion and Analysis for State and Local Governments*, Norwalk
- Indra Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001, *Standar Profesi Akuntansi Publik*, Jogjakarta, Bagian Penerbitan STIE YPKN
- .Kadek Hengki Primayana, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014)
- I Gusti Agung Ray, 2008, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- LAN dan BPKP, 2000, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta
- Lawrence B. Sawyer, 2009, *et al, Internal Auditing*, Salemba Empat, Jakarta
- Li Baihaqi Mustafa, 2004, *Artikel Warta Pengawasan Vol Pengendalin Internal dan Pemberantasan korupsi IX No. 1*
- Made Ayu Darmayani, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama Tungga Atmaja, 2014, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng*.e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (vol: 2 No.1 Tahun 2014)
- Mulyadi, 2002, *Auditing, Edisi Enam*, Salemba Empat, Jakarta
- Ni Made Rika Krisna Dewi dkk, 2014, *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014)
- Nogi S. Tangkilisan, 2007, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta
- Sedarmayanti, 2001, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Stephen P. Robbins, 2006, *Perilaku Organisasi*, Indeks Kelompok Organisasi, Jakarta
- Sugiarto, 2002, *Pengantar Akuntansi*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Warren, Reeve and Fess, 2005, *Accounting: Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta
- www.bpk.go.id Akses pada 15 Desember 2014 pada 20.02